



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/354.1 /IV.13/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN PERCONTOHAN
DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dalam rangka pembinaan percontohan Desa Anti Korupsi di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan berdayaguna, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembinaan Percontohan Desa Anti Korupsi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Percontohan Desa Antikorupsi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBINAAN PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembinaan Percontohan Desa Antikorupsi di Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Uraian Tugas Pokok Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 September 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth.

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Kepala Bagian PBJ Setdakab Lampung Selatan;
7. Camat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 354.1/IY.13/HK/2026
TANGGAL : 21 September 2026

SUSUNAN PERSONALIA

KELOMPOK KERJA PEMBINAAN PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

- | | | |
|------------|---|---|
| Pembina | : | Bupati Lampung Selatan |
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan |
| Ketua | : | Inspektur Kabupaten Lampung Selatan |
| Sekretaris | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan |
- I. Koordinator Pokja Penguatan Tata Laksana
- Anggota
- : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 - : 1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Lampung Selatan
 - : 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
 - : 3. Kepala Bidang Sosial Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan
 - : 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
 - : 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
- II. Koordinator Pokja Penguatan Pengawasan
- Anggota
- : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 - : 1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 - : 2. Inspektur Pembantu II Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 - : 3. Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 - : 4. Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 - : 5. Auditor/PPUPD Ahli Madya Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
 - : 6. Auditor/Auditor Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

- III. Koordinator Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Anggota : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
: 1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan
3. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Koordinator Pokja Penguatan Partisipasi Masyarakat Anggota : Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
: 1. Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
2. Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
3. Kasi Ekobang Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan
- V. Koordinator Pokja Kearifan Lokal Anggota : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
: 1. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
2. Dewan Kesenian Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PEMBINAAN PERCONTOHAN DESA ANTI KORUPSI DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

Pembina	: 1. Memberikan kebijakan umum tentang arah dan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Antikorupsi Kabupaten Lampung Selatan
	2. Memberikan dan menetapkan sasaran yang dicapai.
Ketua	1. Memberikan arahan kepada semua Pokja agar melaksanakan tugas sesuai dengan komponen dan indicator untuk menjadi Desa Antikorupsi
	2. Memfasilitasi dan memberikan solusi pemecahan masalah berkenaan dengan hal-hal yang timbul dilapangan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Antikorupsi Kabupaten Lampung Selatan
	3. Melaporkan kepada Bupati Lampung Selatan terkait hasil pembinaan yang telah dilaksanakan oleh semua Pokja.
Wakil Ketua	: 1. Membantu tugas ketua dalam kegiatan Pembinaan Desa Antikorupsi Kabupaten Lampung Selatan
	2. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua.
Sekretaris	: 1. Membantu tugas ketua dalam Menyusun rencana dan program serta melaksanakan kesekretariatan Pembinaan Desa Antikorupsi Kabupaten Lampung Selatan
	2. Bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Antikorupsi Kabupaten Lampung Selatan kepada ketua.
Pokja Penguatan Tata Laksana	: 1. Melaksanakan pendampingan penyusunan Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya

Pokja Penguatan Pengawasan

2. Melaksanakan pendampingan penyusunan Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
 3. Melaksanakan pendampingan penyusunan Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan
 4. Melaksanakan pendampingan penyusunan Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 5. Melaksanakan pendampingan penyusunan Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya.
- : 1. Melaksanakan pendampingan dan penyediaan data ada tidaknya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
2. Melaksanakan pendampingan dan penyediaan data ada tidaknya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahkan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah
3. Melaksanakan pendampingan dan penyediaan data terkait tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi.

Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- : 1. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat
2. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa
3. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan,

tramtibuslinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya.

Pokja Penguatan Partisipasi Masyarakat

4. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat
5. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Maklumat Pelayanan.

: 1. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa

2. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

3. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pokja Kearifan Lokal

: 1. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

2. Melaksanakan pendampingan terkait ada/tidaknya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA